

Penanaman Nilai-Nilai Karakter Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Polysynchronous di Era New Normal

Nurul Zuriah^{a,1*}

^a Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

¹ zuriahnurul@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 24 November 2020;

Revised: 16 Mei 2021;

Accepted: 8 Juni 2021

Kata-kata kunci:

Era New Normal;

Pancasila;

Penanaman Nilai;

Polysynchronous;

Problematic.

Keywords:

Pandemic Era;

Pancasila;

Value Cultivation;

Polysynchronous;

Problematics.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penanaman nilai-nilai karakter Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Berbasis Polysynchronous di Era New Normal yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif model Milles & Huberman. Informan terdiri dari para dosen dan mahasiswa yang menempuh mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan pada semester gasal 2020/2021. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam penanaman nilai-nilai Pancasila dalam Pembelajaran PPKn dengan platform Polysynchronous di Era New Normal. Ada tiga komponen penting dalam penelitian ini, yaitu: (1) masalah substansi nilai yang dikembangkan; (2) metode penanaman nilai yang dikembangkan; (3) penggunaan evaluasi penanaman nilai. Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Hal ini mengindikasikan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila dalam Pembelajaran PPKn yang menggunakan platform polysynchronous membutuhkan pencermatan, elaborasi dan pengembangan lebih lanjut untuk efektivitasnya di masa mendatang.

ABSTRACT

The Planting the Values of Pancasila Character in Polysynchronous-based Citizenship Education Learning in the New Normal Era. This research aims to analyze the problematics of planting Pancasila character values in Polysynchronous-Based PPKn Learning in the New Normal Era conducted at the University of Muhammadiyah Malang (UMM). The research method uses descriptive qualitative, with interactive analysis of the Milles & Huberman model. The informants consisted of lecturers and students taking Pancasila and Citizenship Education courses in the odd semester 2020/2021. The sampling technique used purposive sampling and snowball. The results showed that the problems in the cultivation of Pancasila Values in the PPKn Learning using the Polysynchronous platform in the New Normal Era developed by UMM. There are three important components in this research: (1) the problem of the substance of the value developed; (2) the method of value cultivation; (3) the use of value planting evaluation. There are supporting and inhibiting factors found in its implementation. This indicates that the inculcation of Pancasila Values in PPKn Learning using the polysynchronous platform requires further scrutiny, elaboration and development for its effectiveness in the future.

Copyright © 2021 (Nurul Zuriah). All Right Reserved

How to Cite : Zuriah, N. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Polysynchronous di Era New Normal . Jurnal Moral Kemasyarakatan, 6(1), 12-25. <https://doi.org/10.21067/jmk.v6i1.5086>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pembelajaran pada abad ke-21 sebagai abad belajar, menuntut perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma tersebut tercermin dalam perubahan pandangan terhadap belajar dan mengajar yang lebih menekankan pada dimensi sosial dan konstruktivistik. Konsep-konsep belajar saat ini yang diperoleh berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diperlukan untuk membelajarkan pembelajar menghadapi abad belajar. Kesuksesan individu dalam dunia kerja pada abad ke-21 tidak cukup hanya berpengetahuan luas saja, tetapi juga bagaimana menyimpan pengetahuan saat ini, mengaplikasi-kannya untuk memecahkan masalah baru dan berfungsi sebagai anggota tim.

Pembelajaran di abad 21 dituntut dapat mempersiapkan mahasiswa menyongsong kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat (Sari, 2016; Sujana, A., & Rachmatin, D. 2019). Perkembangan digitalisasi yang semakin pesat berdampak pada dunia pendidikan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang berbasis pada teknologi. Implikasinya Perguruan Tinggi dituntut untuk menyiapkan sarana prasarana pendidikan yang berbasis teknologi informasi di samping menyiapkan juga *stakeholders* pendidikan yang menguasai *Information and Communication Technologies (ICT) literacy skill*. Dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, bahkan orang tua dituntut melek teknologi dan media komunikasi, dapat melakukan komunikasi yang efektif, berpikir kritis, dapat memecahkan masalah dan bisa berkolaborasi. Namun demikian, yang perlu dipahami secara bijak bahwa sejatinya, teknologi pembelajaran adalah bukan tentang teknologi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan dengan tepat untuk membuat mahasiswa belajar (Sari, 2016; Wijaya, Sudjimat, Nyoto, 2016).

Hasil penelitian terdahulu dari (Susilawati, 2017) menunjukkan Pengembangan model pembelajar an *blended learning* pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) berupa produk pembelajaran dalam bentuk program pembelajaran *online* yang dikemas dalam sistem manajemen pembelajaran (LMS) dengan menggunakan aplikasi program Edmodo. Kemudian penelitian dari (A.R.Sari, 2013) menunjukkan bahwa strategi pembelajaran *Blended Learning* terbukti berhasil meningkatkan Kemandirian Belajar, *Critical Thinking*, maupun prestasi belajar dari mahasiswa terhadap perkuliahan Evaluasi Pembelajaran Akuntansi. Demikian juga hasil penelitian dari (Hasanah, 2020) menunjukkan bahwa aktivitas belajar *daring* mahasiswa pada masa tanggap darurat COVID-19 atas kebijakan belajar di rumah cukup baik. Penelitian lain dilakukan oleh (A.Rusdiana et.al, 2020) menunjukkan bahwa penerapan model POEzWE berbasis *Blended Learning* dengan media *Google Classroom* dapat dimanfaatkan sebagai solusi masalah dalam proses Pembelajaran Masa WFH Pandemic Covid-19. Kemudian penelitian peneliti sebelumnya (Zuriah, 2020) menunjukkan bahwa: Strategi dan implementasi pembelajaran *Blended Learning Google Classroom* terbukti berhasil meningkatkan kemandirian belajar, *Critical Thinking*, maupun prestasi belajar mahasiswa dalam perkuliahan Perencanaan Pembelajaran PPKn di Perguruan Tinggi. Beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut berkontribusi sebagai referensi dalam topik ini.

Berhubung Pandemi COVID-19, maka seluruh kampus di Indonesia diterapkan kebijakan kegiatan pembelajaran *daring* dari jarak jauh atau kuliah *online*. Namun kenyataannya para pelajar ataupun mahasiswa belum sepenuhnya terbiasa melakukan aktivitas belajar *daring*. Pendidik serta dosen masih terdapat yang belum begitu mahir mengajar melalui media pembelajaran teknologi internet atau *daring* terutama yang berada di daerah. Dalam rangka menyambut pembelajaran di Era New Normal, maka Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) membuat sebuah *Branding* pembelajaran bauran atau *blended learning* di UMM diberi nama *Polysynchronous learning*. Desain pembelajaran bauran oleh tim dinamakan desain Pembelajaran Bauran Siklus Pe5 (Perencanaan, Pemahaman, Pendalaman, Penerapan, dan Penilaian). Siklus Pe5 ini diterapkan pada setiap pertemuan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran PPKn sebagai bagian dari MKU yang dilaksanakan di seluruh prodi dan fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Malang juga menerapkan pembelajaran model

Polysynchronous/Blended Learning, Sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan *Blended Learning* di UMM dan diperkuat dengan Surat Edaran Rektor Nomor: E.6.0/540/UMM/2020 tentang penerapan *Polysynchronous Learning* di lingkungan UMM juncto Keputusan Rektor No. 24/SK / UMM/VI/ 2020 tentang Aktivitas Kenormalan Baru Kampus dan Lingkungan dalam Suasana Pandemi Covid-19 Universitas Muhammadiyah Malang. (Hamid, edy Suandi; Khalil, 2020). Sebagai suatu sistem pembelajaran yang baru dikembangkan, tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut terutama berkaitan dengan analisis problematik penanaman nilai-nilai Pancasila dalam Pembelajaran PPKn Berbasis *Polysynchronous* di Era New Normal yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang.

Metode

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Pemilihan informan yang memberikan masukan data informasi penelitian dengan cara *purposive sampling*, dengan demikian akan terdapat dua informan penting yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan pendukung (*support informan*). Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan metode angket (*google form*), observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan pendukung adalah sebanyak 30 orang mahasiswa yang diambil secara acak dari kelas Ilmu Hukum C, D dan E dengan kriteria: 1) terdaftar sebagai mahasiswa di prodi Ilmu Hukum C, D dan E, 2) menempuh mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 3) bersedia menjadi informan. Informan kunci selanjutnya adalah dua orang dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di prodi Ilmu Hukum. Demi menjaga privasi dan mengikuti etika penelitian, peneliti hanya akan menyebutkan dengan inisial. Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif Milles dan Huberman (1994). Hal ini didasarkan dengan mengacu pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data yang sangat beragam, sehingga peneliti melakukan analisis dan pemilihan data yang relevan serta syarat makna. Pengolahan data yang diperoleh dari penelitian ini diolah dengan pengolahan manual melalui empat tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan rumusan dalam bab hasil dan pembahasan, peneliti menggambarkan temuan penelitian dengan membahasnya secara langsung sebagai berikut: substansi nilai karakter yang dikembangkan dalam pembelajaran PPKn berbasis *Polysynchronous* di Era New Normal yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang bersumber pada nilai Pancasila. Terdapat lima karakter utama yang dapat ditarik dari Pancasila, yaitu: nilai karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong dan integritas (RENAMAGI). Nilai-nilai karakter tersebut tidak dapat berdiri sendiri namun saling berinteraksi dalam membentuk karakter pribadi.

Kekayaan keragaman nilai dalam Pancasila merupakan modal dasar utama penyelenggaraan pendidikan karakter. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama dapat dijadikan acuan utama penanaman beberapa nilai karakter berikutnya. Nilai toleransi selama ini cenderung hanya sebagai wacana dan sulit untuk dilaksanakan karena terhenti pada tataran wacana kognitif saja. Kondisi ini mengakibatkan kelemahan karakter toleransi dalam masyarakat (kasus intoleransi masih sering terjadi akhir-akhir ini). Laporan Setara Institute selama 12 tahun terakhir kasus intoleransi agama sebagai berikut: Jawa Barat 629, DKI Jakarta 291, Jawa Timur 270, Jawa Tengah 158, Aceh 121, Sulawesi Selatan 112, Sumatera Utara 106, Sumatera Barat 104, Banten 90, dan Nusa Tenggara Barat 76 (Susetyo, 2020). Untuk meminimalisir kasus-kasus intoleransi di atas, maka kegiatan perkuliahan dalam PPKn dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan bersama dan permainan yang menarik di ruang publik. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan nilai toleransi dalam pembelajaran PPKn berbasis *Polysynchronous* adalah Substansi nilai religius dan toleransi tersebut menjadi tolok

ukur dalam dialog dan diskusi yang terjadi di dunia maya (*internet, vicon, zoom, web meet dll*) agar tepat sasaran dan efektif dalam retensi belajar mahasiswa.

Selanjutnya, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi bagian penting dalam rantai pendidikan karakter bangsa. Memberadabkan sesama manusia menjadi modal utama dalam relasi sosial. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan karakter adalah kemampuan untuk memberikan apresiasi kepada orang lain. Melalui berbagai kegiatan praktis keseharian misalnya tentang masalah kerapian, kebersihan diri, dan ketekunan merupakan proses pembelajaran yang menjadikan mahasiswa menjadi manusia yang beradab. Hal tersebut dapat dilakukan melalui manajemen konflik. Ada sebagian orang yang melihat dan berpendapat bahwa konflik adalah tabu sehingga konflik dihindari dan disingkirkan dari ranah pembelajaran. Padahal melalui konflik, manusia dapat belajar saling memberadabkan satu sama lain. Diksi konflik di sini bukan berarti anarkhis. Konflik dapat diajarkan melalui proses debat dan pemaparan argumen. Pendidikan manajemen konflik perlu diajarkan dalam perkuliahan PPKn dengan tujuan memberadabkan manusia dan, untuk saling menghargai satu sama lain.

Nilai Sila persatuan Indonesia mampu dijelaskan secara baik melalui topik identitas nasional dengan mengenalkan keragaman budaya Indonesia secara fisik. Berbagai hasil kebudayaan nasional sebagai contoh dan representasi kearifan lokal yang berkembang di seluruh daerah Indonesia, adalah pintu masuk yang sangat strategis untuk pemahaman nilai-nilai persatuan Indonesia. Cinta tanah air sebagai esensi dasar karakter persatuan, penanamannya tidak perlu dengan cara-cara yang sangat abstrak dan kompleks. Nilai karakter ini dapat dibangun dengan membangun kreativitas mahasiswa melalui *project citizen* atau *project netizen* dengan tema *Aku, Kamu, Kami, Kita Cinta Indonesia dan Pancasila*. Tentunya mereka diminta membawa ciri khas kebudayaan daerah yang mereka miliki dalam produk *project netizen*nya berupa video kreatif yang akan diunggah di medsos (*you tube, instagram, face book*) di akhir perkuliahan. Kreativitas mahasiswa dalam konteks ini sangat tergantung pada kemampuan kognitif (*civic knowledge*), sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skill*) mahasiswa. Melalui bantuan teknologi yang canggih dapat dikenalkan keragaman daerah yang ada di Indonesia dengan mudah, proses kreativitas mahasiswa juga makin mudah dengan bantuan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Dengan bantuan teknologi modern ini mengajarpun jadi lebih mudah, ekspresif dan menarik serta menyenangkan. Persoalan yang muncul berkaitan dengan nilai nasionalis dan cinta tanah air dalam pembelajaran PPKn berbasis Polysynchronous adalah substansi nilai nasionalis, persatuan dan cinta tanah air tersebut menjadi roh dalam dialog dan diskusi yang terjadi di dunia maya (*internet, vicon, zoom, web meet dll*) agar tepat sasaran dan efektif dalam retensi belajar mahasiswa.

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan adalah sila yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi di Indonesia. Permasalahan yang menarik adalah Nilai Demokrasi (musyawarah dan mufakat) telah dimiliki bangsa Indonesia, namun demikian nilai tersebut sulit sekali untuk dilaksanakan dengan baik. Nilai demokrasi yang mendasar adalah taat asas, sesuai prosedur dan menghargai martabat orang lain sesuai hati nurani (*civic disposition*). Nilai ini dapat disampaikan dalam pembelajaran PPKn sebagai wahana pendidikan karakter mahasiswa. Mahasiswa dikenalkan dengan prosedur yang benar sesuai aturan atau asas yang berlaku. Hal ini bukan hanya mengajak mahasiswa menjadi pribadi yang patuh dan taat asas semata. Namun mengajak mereka untuk menjadi pribadi yang taat dan menjunjung tinggi hukum. Taat adalah bagian dari nilai disiplin. Latihan disiplin diri patut diberikan pada mahasiswa sebagai suatu proses untuk menghargai dan melibatkan orang lain. Persoalan yang muncul berkaitan dengan nilai Demokrasi, musyawarah mufakat dan taat asas dalam pembelajaran PPKn berbasis Polysynchronous adalah substansi nilai Demokrasi, taat asas pada hukum tersebut menjadi jiwa dan semangat dalam dialog dan diskusi yang terjadi di

dunia maya (*internet, vicon, zoom, web meet, dll*) agar tepat sasaran dan efektif dalam retensi belajar mahasiswa.

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan basis dari kepekaan dan kepedulian sosial yang sangat krusial. Manusia berkarakter salah satu indikatornya adalah manusia yang mampu berjuang untuk sesama, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan hakikat keadilan sosial. Keadilan sosial tidak perlu dibahas dalam tataran wacana dan cakupan yang sangat luas dan menerawang, namun pembahasan dapat dilakukan secara kontekstual dan ada dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Apakah mahasiswa telah memiliki empati atau berbelas rasa (*compassion*) kepada mahasiswa yang lain? Apakah mahasiswa peduli dan empati dengan kasus-kasus kemiskinan yang dihadapi masyarakat sekitarnya, sebagai dampak pandemi COVID-19? Apakah mahasiswa telah memiliki rasa keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia? Hal seperti inilah yang perlu disampaikan dalam perkuliahan PPKn sehari-hari. Persoalan yang muncul berkaitan dengan nilai peduli sosial Demokrasi, musyawarah mufakat dan taat asas dalam pembelajaran PPKn berbasis *Polysynchronous* adalah substansi nilai empati, simpati, peduli sosial dan keadilan sosial tersebut menjadi jiwa, semangat dan diinternalisasikan secara baik dalam dialog dan diskusi yang terjadi di dunia maya (*internet, vicon, zoom, web meet dll*) agar tepat sasaran dan efektif dalam retensi belajar mahasiswa.

Nilai sila persatuan Indonesia mampu dijelaskan secara baik melalui topik identitas nasional dengan mengenalkan keragaman budaya Indonesia secara fisik. Berbagai hasil kebudayaan nasional sebagai contoh dan representasi kearifan lokal yang berkembang di seluruh daerah Indonesia, adalah pintu masuk yang sangat strategis untuk pemahaman nilai-nilai persatuan Indonesia. Cinta tanah air sebagai esensi dasar karakter persatuan, penanamannya tidak perlu dengan cara-cara yang sangat abstrak dan kompleks. Nilai karakter ini dapat dibangun dengan membangun kreativitas mahasiswa melalui *project citizen* atau *project netizen* dengan tema *Aku, Kamu, Kami, Kita Cinta Indonesia dan Pancasila*. (Zuriah, 2020). Tentunya mereka diminta membawa ciri khas kebudayaan daerah yang mereka miliki dalam produk *project netizen*nya berupa video kreatif yang akan diunggah di media sosial (*you tube, instagram, face book*) di akhir perkuliahan. Kreativitas mahasiswa dalam konteks ini sangat tergantung pada kemampuan kognitif (*civic knowledge*), sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) dan ketrampilan kewarganegaraan (*civic skill*) mahasiswa. Melalui bantuan teknologi yang canggih dapat dikenalkan keragaman daerah yang ada di Indonesia dengan mudah, proses kreativitas mahasiswa juga makin mudah dengan bantuan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Dengan bantuan teknologi modern ini mengajarpun jadi lebih mudah, ekspresif dan menarik serta menyenangkan. Persoalan yang muncul berkaitan dengan nilai nasionalis dan cinta tanah air dalam pembelajaran PPKn berbasis *Polysynchronous* adalah substansi nilai nasionalis, persatuan dan cinta tanah air tersebut menjadi roh dalam dialog dan diskusi yang terjadi di dunia maya (*internet, video conference, zoom, webmeeting, dll*) agar tepat sasaran dan efektif dalam retensi belajar mahasiswa.

Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan adalah sila yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kehidupan demokrasi di Indonesia. Permasalahan yang menarik adalah nilai demokrasi (musyawarah dan mufakat) telah dimiliki bangsa Indonesia, namun demikian nilai tersebut sulit sekali untuk dilaksanakan dengan baik. Nilai demokrasi yang mendasar adalah taat asas, sesuai prosedur dan menghargai martabat orang lain sesuai hati nurani (*civic disposition*). Nilai ini dapat disampaikan dalam pembelajaran PPKn sebagai wahana pendidikan karakter mahasiswa. Mahasiswa dikenalkan dengan prosedur yang benar sesuai aturan atau asas yang berlaku. Hal ini bukan hanya mengajak mahasiswa menjadi pribadi yang patuh dan taat asas semata. Namun mengajak mereka untuk menjadi pribadi yang taat dan menjunjung tinggi hukum. Taat adalah bagian dari nilai disiplin. Latihan disiplin diri patut diberikan pada mahasiswa sebagai suatu proses untuk menghargai dan melibatkan orang lain. Persoalan yang

muncul berkaitan dengan nilai demokrasi, musyawarah mufakat dan taat asas dalam pembelajaran PPKn berbasis Polysynchronous adalah substansi nilai Demokrasi, taat asas pada hukum tersebut menjadi jiwa dan semangat dalam dialog dan diskusi yang terjadi di dunia maya agar tepat sasaran dan efektif dalam retensi belajar mahasiswa.

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan basis dari kepekaan dan kepedulian sosial yang sangat krusial. Manusia berkarakter salah satu indikatornya adalah manusia yang mampu berjuang untuk sesama, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan hakikat keadilan sosial. Keadilan sosial tidak perlu dibahas dalam tataran wacana dan cakupan yang sangat luas dan menerawang, namun pembahasan dapat dilakukan secara kontekstual dan ada dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Apakah mahasiswa telah memiliki empati atau berbelas rasa (*compassion*) kepada mahasiswa yang lain? Apakah mahasiswa peduli dan empati dengan kasus-kasus kemiskinan yang dihadapi masyarakat sekitarnya, sebagai dampak pandemi COVID-19? Apakah mahasiswa telah memiliki rasa keadilan sosial untuk seluruh masyarakat Indonesia? Hal seperti inilah yang perlu disampaikan dalam perkuliahan PPKn sehari-hari. Persoalan yang muncul berkaitan dengan nilai peduli sosial Demokrasi, musyawarah mufakat dan taat asas dalam pembelajaran PPKn berbasis *Polysynchronous* adalah substansi nilai empati, simpati, peduli sosial dan keadilan sosial tersebut menjadi jiwa, semangat dan diinternalisasikan secara baik dalam dialog dan diskusi yang terjadi di dunia maya agar tepat sasaran dan efektif dalam retensi belajar mahasiswa.

Berdasarkan uraian di atas, Pancasila yang sangat kaya akan nilai-nilai keutamaan hidup, seharusnya mampu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Pengertian sejahtera disini adalah bebas dari tindakan anarkhis, lepas dari masalah fundamentalitas agama, radikalisme kesukuan, dualisme minoritas-mayoritas, dan perekonomian yang berkeadilan sosial bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Munawar (2020) yang menyatakan bahwa melawan konservatisme dan konflik-konfliknya: tantangan KeIndonesiaan kita berupa konservatisme, eksklusivisme/fundamentalisme, intoleran, radikalisme dan terorisme. Dapat dilakukan dengan Pancasila. Dengan Pancasila kita membayangkan keberagaman yang konservatisme bisa berkembang menjadi progresif, inklusif, toleransi, demokrasi dan inklusi sosial (Munawar-rachman, 2020).

Salah satu jalan yang paling strategis untuk mewujudkan kesejahteraan bersama itu adalah melalui pendidikan karakter berkeindonesiaan, yaitu Karakter Pancasila. Pendidikan Karakter tidak dapat direduksi pada tataran angka. Bukan berarti sulit dilakukan, namun butuh keberanian berbagai pihak pemangku kepentingan untuk meletakkan pendidikan karakter pada ranah afeksi mahasiswa. Pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila secara utuh tentunya menjadi syarat pokok kompetensi profesional setiap pendidik (guru/dosen) pada umumnya dan pendidik (guru/dosen) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan tinggi pada khususnya. Di samping kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogi dan kompetensi sosial lainnya.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila secara terus menerus terus dilakukan sebagai wujud dalam membumikan ideologi negara (Pancasila). Wiratomo, Wahono, & Kristiono (2017) menjelaskan jika pemahaman nilai Pancasila terbagi menjadi tiga yaitu rendah, sedang dan menengah. Pemahaman rendah terbatas pada kemampuan menyebutkan dan konsep, kemampuan menengah ialah kemampuan pemahaman dalam konsep dan pengertian dan kemampuan tinggi ialah kemampuan menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan beberapa peristiwa. Internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi dalam fungsi mewujudkan warganegara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*) adalah upaya dalam pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Maftuh (2008) yang menyatakan bahwa :

Nilai-nilai pendidikan karakter yang diinginkan dan dibutuhkan oleh mahasiswa dan dosen setelah diolah melalui analisis interaktif, adalah: religius, disiplin,

bersahabat/komunikatif, tanggungjawab, jujur, kerja keras, peduli lingkungan, cinta tanah air, kreatif, mandiri, menghargai prestasi, ulet. Dimana nilai-nilai karakter tersebut yang diharapkan telah tertanam di dalam lulusan perguruan tinggi (Maftuh, 2008). Sedangkan nilai karakter yang perlu ditanamkan dalam pembelajaran di perguruan tinggi dalam konteks sekarang mengacu pada nilai RENAMAGI (Religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong dan integritas) serta enam elemen kunci Profil Pelajar Pancasila (Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, mandiri, bergotong-royong, bernalar kritis dan kreatif) (Pendidikan et al., 2020).

Sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara yang demikian maju dengan segala tantangannya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tampaknya perlu memperluas misinya dari sekedar pendidikan politik. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi sebagai berikut: PPKn sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekakan politik (*political literacy*) dan kesadaran berpolitik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi. PPKn sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui PPKn diharapkan tertanam dan tertransformasinya nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi upaya *nation and character building*. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila tetap harus menjadi rujukan utama dalam upaya pendidikan nilai ini.

PPKn sebagai pendidikan nasionalisme, yang berarti melalui PPKn diharapkan dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan rasa kebangsaan atau nasionalisme siswa, sehingga mereka lebih mencintai, merasa bangsa, dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. PPKn sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi. PPKn sebagai pendidikan multikultural (*multicultural education*), yang berarti PPKn diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan sikap toleran siswa dan mahasiswa untuk hidup dalam masyarakatnya yang multikultural. PPKn sebagai pendidikan resolusi konflik (*conflict resolution education*), yang berarti PPKn membina siswa dan mahasiswa untuk mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Maftuh (2008) di atas.

Berkaitan dengan proses penanaman Nilai-Nilai Karakter Pancasila dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Polysynchronous di Era New Normal, maka dapat diuraikan beberapa fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Selaras dengan misi dan fungsi PPKn tersebut, maka berdasarkan hasil angket, wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini maka beberapa pendapat tentang metode penanaman nilai-nilai Pancasila yang dilakukan dalam Pembelajaran PPKn Berbasis *Polysynchronous* di Era New Normal yang dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu: “menyangkut pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang telah mereka alami dan berjalan selama ini, sebageian besar informan menjawab metodenya menjemukan dan membosankan. Karena cara penyampaian materi kebanyakan dilakukan melalui ceramah dan diskusi yang kurang fokus.” (W/KI/M1/5/12/2020). “Apalagi bentuk-bentuk penugasan yang kurang menyenangkan mahasiswa justru menjadi beban bahwa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan tinggi menjadi kurang menarik dan tidak diminati. Situasi ini ditunjang dengan porsi 2 sks yang menjadikan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan hanya menjadi menu wajib pendidikan tinggi yang kurang bermakna.” (W/KI/M2/6/12/2020). Namun sebagian informan ada yang memberi kesaksian, “pendidikan Pancasila yang mereka alami sudah cukup memberi wawasan yang cukup bagi dirinya.” (W/KI/M/7/12/2020).

Ide menarik lainnya adalah bahwa proses pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan tinggi cukup berat dan menantang karena harus bertemu dengan mahasiswa

dengan aneka macam karakter dan latar belakang yang berbeda. Tidak mudah untuk menanamkan Pancasila dalam diri mereka. Sebaiknya mahasiswa diajak *sharing*, menganalisis kasus. Jikalau pengajar kreatif dan melakukan pendekatan yang tepat, maka manfaatnya akan terasa bagi pembentukan karakter mahasiswa. Kuncinya adalah pada dosen yang harus mengajar dengan penyampaian materi yang menyenangkan, menarik dan inovatif.

Metode dan model Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang relevan dan kontekstual untuk saat ini adalah model Pendidikan yang harus menarik dan bisa menyenangkan bagi siapa saja yang belajar Pancasila. Terutama mahasiswa harus menjadi subyek pembelajaran dan harus aktif dalam proses belajar mengajar. Misalnya metode pembelajaran *E-Learning*, yakni pembelajaran dengan media-media elektronik, dengan cara membuka website, untuk mencari contoh nyata terkait materi, penyampaian gagasan lewat *facebook*, *twitter* atau media lain yang familier di kalangan mahasiswa saat ini, atau penggunaan audio visual untuk memudahkan daya ingat dan menumbuhkan ketertarikan mahasiswa. Pembelajaran di luar kelas (*out class*) untuk menelaah fenomena social terkait materi juga bisa dilakukan. Prinsipnya, sarana dan media yang tersedia harus seoptimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk proses pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan agar lebih kreatif dan menarik. Menurut para informan model pembelajaran dengan menggunakan platform Polysynchronous ini cukup menarik dan menantang. Walaupun kadangkala juga merasa bosan, kalau lama-lama di depan laptop yang terus menerus mata menjadi pedas.

Berikut ini adalah ide kreatif dan inovatif dari para informan yang telah dipetakan terkait dengan metode pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan tinggi melalui angket dan wawancara mendalam yang diklasifikasikan dan disimpulkan sebagai berikut: pertama, ide mereka adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebaiknya dilakukan sejak usia dini, sehingga dapat meresap dan mendarah daging, bahkan pasca kuliah di pendidikan tinggi juga harus tetap ada dalam bentuk-bentuk sosialisasi tentang Pancasila. Pancasila benar-benar menyatu dan mendarah daging. Kedua, menggelar *webinar* atau *zoominar* tentang sosialisasi Pancasila—refleksi dan implementasinya serta mengundang motivator agar tidak menjemukan dan mudah diterima. Ketiga, jumlah SKS mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu ditambah menjadi 3 atau 4 SKS. Keempat, menggunakan media visualisasi agar mudah dipahami dan menarik. Kelima, ide lainnya yang disampaikan adalah pembelajaran sebaiknya berlangsung pada contoh kasus nyata yang aktual, keteladanan, pembiasaan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh Memakai baju batik adalah bentuk cinta produk dalam negeri dan cinta tanah air. Setiap fenomena sosial dikaitkan dengan konsep Pancasila dan harus bisa menyimpulkan Pancasila yang ideal dan kontekstual. Berkunjung ke museum sejarah dan institusi yang berkaitan dengan tata pemerintahan/lembaga Negara serta memperbanyak dialog antar umat beragama.

Hal ini sejalan dengan pendapat Budiyono dan Wawan Kokotiasa (2013) yang menyatakan bahwa model pendidikan Pancasila di perguruan tinggi seharusnya mengedepankan proses dialektika dalam melakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Mekanisme dialogis itu bisa terintegrasi dengan kurikulum atau merupakan kegiatan ekstra kurikuler. Prinsipnya adalah mahasiswa harus menjadi subyek yang aktif dengan model-model partisipatoris. Didukung pemanfaatan teknologi terkini diharapkan pembelajaran Pancasila menjadi relevan dan kontekstual seperti penggunaan *audio visual*, *website*, *facebook*, *twitter*, *instagram* yang dewasa ini sedang menjangkiti kawula muda (Kokotiasa & Budiyono, 2013).

Beberapa ide cerdas yang lain yang disampaikan para informan adalah sebagaimana tercermin dalam hasil wawancara dengan KID-1 sebagai berikut:

“(1) mengaitkan teori-teori yang dipelajari dengan realita kasus yang terjadi, mahasiswa diajak untuk mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi dan trending topic atau viral saat ini. (2) model pembelajaran PPKn juga harus disertai

dengan simulasi agar materi yang disampaikan melekat dengan kuat dalam benak mahasiswa, terjun langsung ke lapangan untuk menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa. (3) Model pembelajara PPKn yang digunakan seharusnya aktual, fleksibel, dinamis, kontekstual (sesuai dengan konteks lingkup sistem sosial yang berlaku). (4) Model pembelajaran S5 + 4H (senyum, sapa, salam, sopan, santun) + (head, heart, hand, habits) untuk melatih mahasiswa agar bersikap baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. (5) Metode Role playing (bermain peran atau drama), merupakan contoh model pembelajaran yang menarik dan interaktif yang menuntut mahasiswa lebih aktif berperan serta dalam pembelajaran.” (W/KID-1/21/12/2020).

Hal senada juga disampaikan oleh informan yang lain (KID- 2) sebagai berikut: “Ide lain yang dapat dilakukan dosen dalam pembelajaran PPKN adalah perlu dilakukan upaya mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari dan menggunakan forum diskusi, mengaplikasikan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara nyata di lingkungan masyarakat, menggunakan model debat tentang aktualisasi nilai-nilai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari atau membentuk presentasi kelompok dan diskusi layak untuk digunakan dalam pembelajaran dan penanaman nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan platform Polysynchronous di UMM dengan menggunakan ilustrasi-ilustrasi yang menyenangkan dan mengadakan diskusi secara intensif.” (W/KID-2/22/12/2020).

Di samping beberapa ide dan gagasan inovatif di atas, tidak kalah pentingnya untuk penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn berbasis Polysynchronous di UMM adalah menggunakan metode inkulkasi dari pada metode indoktrinasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Jansen dan Knight (Benninga, 1991) menyatakan bahwa pengajaran moral secara langsung dapat berupa penyajian konsep melalui contoh dan definisi, diskusi kelas dan bermain peran, atau melalui pemberian hadiah (pujian) bagi perilaku yang sesuai. Metode indoktrinasi dan inkulkasi dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan langsung dalam pendidikan moral. Sementara itu, klarifikasi nilai (*value clarification*), pendidikan moral kognitif, dan inkuiri nilai, dapat diklasifikasikan sebagai pendekatan tidak langsung dalam pendidikan moral (Maftuh, 2008) dan (Saputra, R.D., 2018).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka beberapa pemikiran dan konsep kunci yang ditarik dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai basis internalisasi nilai-nilai Pancasila adalah sebagai berikut: pertama, pembelajaran PPKn hendaknya bermuatan nilai (*value-based*), artinya PPKn mesti mengembangkan sikap, nilai, dan moral atau kecerdasan emosional dan kecerdasan moral mahasiswa, bukan hanya mengembangkan kemampuan dan kecerdasan intelektual. Dengan demikian PPKn perlu mengembangkan secara terpadu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme, PPKn memang harus bermuatan nilai.

Kedua, pembelajaran PPKn hendaknya bermakna (*meaningful*), yakni PPKn mampu membelajarkan dan membinakan kemampuan atau kompetensi hidup yang bermakna kepada para mahasiswa, bukan sekedar menyampaikan informasi yang artifisial atau kurang bermanfaat bagi kehidupan mahasiswa. Pembelajaran bermakna mengandung arti bahwa kemampuan yang dimiliki mahasiswa dapat digunakan secara fungsional sepanjang kehidupannya. Ketiga, pembelajaran PPKn mesti mengundang siswa untuk aktif dalam belajar. Dengan demikian, pembelajaran PPKn harus berpusat kepada mahasiswa (*student centered*). Keaktifan mahasiswa ini dapat diwujudkan melalui aktivitas membaca, bertanya, berdiskusi, mengumpulkan data, menganalisis data, menilai (*value judgment*), memecahkan masalah, ataupun mengambil keputusan.

Keempat, pembelajaran PPKn yang baik adalah pembelajaran terpadu, baik terpadu dilihat dari konsep-konsep keilmuan, maupun terpadu dari ranah (*domain*) pendidikan yang dikembangkannya (kognitif, afektif, dan psikomotor). Kelima, pembelajaran PPKn hendaknya mampu mengundang kemampuan berpikir mahasiswa pada taraf yang lebih tinggi. Dengan

demikian PPKn bukan hanya mengajari mahasiswa dengan kemampuan mengingat (*recall*) fakta atau konsep, tetapi juga sampai pada kemampuan berpikir analitis, kritis, kreatif, reflektif, dan evaluatif. Cara penjelasan, teknik bertanya dan tugas-tugas yang dirancang secara baik oleh dosen dapat membantu mengundang kemampuan berpikir mahasiswa. Pengembangan kemampuan berpikir ini juga sangat perlu dalam masalah penanaman nilai, di mana diharapkan nilai-nilai yang dibinakan dapat diterima mahasiswa dengan penuh nalar.

Keenam, pembelajaran PPKn hendaknya demokratis, artinya dilangsungkan dalam suasana hubungan antar mahasiswa dan antara mahasiswa dan dosen yang terbuka, kekeluargaan, harmonis dan manusiawi, tanpa ada tekanan fisik maupun psikologis. Pembelajaran PPKn bukan sekedar mengajar apa itu konsep demokrasi, melainkan pembelajaran yang dilakukan secara demokratis dalam suasana yang demokratis pula. Ketujuh, pembelajaran PPKn itu hendaknya menyenangkan (*joyful*) bagi mahasiswa, artinya mahasiswa merasa senang dan tertarik dengan mata pelajaran PPKn, bukan justru sebaliknya merasa bosan dan membenci PPKn karena dianggap tidak menyenangkan. Oleh karena itu, *learning by playing* atau *learning by doing* dalam PPKn perlu lebih dikenalkan dari pada sekedar verbalisme atau mengingat fakta (*memorizing facts*). Pembelajaran PPKn hendaknya efektif dan efisien, artinya pengajaran yang sederhana, tidak *complicated*, tetapi mampu mencapai target kompetensi atau tujuan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan masalah evaluasi dalam penanaman Nilai-nilai Pancasila yang digunakan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dalam melakukan evaluasi implementasi penanaman nilai-nilai Pancasila yang digunakan dengan pembelajaran berbasis *polysynchronous* di tempat penelitian dilakukan, digunakan format penilaian atau catatan lembar evaluasi, pengamatan perilaku, dan sikap mahasiswa. Evaluasi dalam PPKn sebagai wahana pendidikan karakter dilakukan untuk mengukur apakah Mahasiswa sudah memiliki satu atau sekelompok karakter yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, substansi evaluasi dalam konteks pendidikan karakter bermaksud untuk membandingkan perilaku mahasiswa dengan standar atau indikator karakter yang telah ditetapkan oleh dosen sebagai pengampu dan pembina matakuliah. Proses membandingkan antara perilaku mahasiswa didik dengan indikator karakter dilakukan tidak melalui tes (tapi melalui evaluasi non tes).

Dosen berperan sebagai tokoh sentral dan komponen penting dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Ruang kelas (*ruang zoom, web meeting*) merupakan *setting* utama dalam penilaian pendidikan karakter. Evaluasi pendidikan karakter dilaksanakan di dalam kelas dengan melakukan pengamatan (observasi) terhadap tingkah laku mahasiswa, baik perilakunya dengan sesama mahasiswa lainnya maupun dengan Dosen. Dosen memiliki format penilaian atau instrumen yang digunakan dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Dosen memiliki buku jurnal pembelajaran/perkuliah yang di dalamnya terdapat laporan absensi belajar mahasiswa, hasil penilaian, analisis hasil evaluasi belajar, catatan pembinaan mahasiswa, dan lain sebagainya.

Setting kedua dalam penilaian pendidikan karakter adalah kampus, dimana Mahasiswa akan berinteraksi dengan teman-temannya, dosen, tenaga administrasi, satpam kampus, dan petugas kebersihan. Dalam *setting* kedua ini Mahasiswa akan berhadapan dengan semua warga kampus, dengan jumlah yang lebih besar daripada *setting* utama (dalam kelas). Dosen akan mengamati bagaimana mahasiswa berinteraksi dengan warga kampus atau civitas akademika lainnya serta memberikan penilaian berdasarkan aspek karakter apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa, disesuaikan dengan format penilaian yang telah ditetapkan dosen dalam RPS. Rumah, merupakan *setting* ketiga atau terakhir dalam evaluasi pendidikan karakter, dimana penilaian karakter di rumah akan melibatkan orang tua jika masih ada), walinya, kakak atau adiknya. Apabila tidak ada laporan dari rumah mahasiswa, maka pihak kampus bertanggung jawab bahwa perilaku Mahasiswa tersebut tidak bermasalah. Namun, di samping itu bila diperlukan pihak kampus akan melakukan kunjungan untuk melakukan pengamatan atau wawancara dengan orang tua mahasiswa. Ini kondisi idealnya. Namun karena kondisi di era new normal,

dimana perkuliahan hanya bisa dilakukan secara *daring*, maka untuk aspek observasi secara langsung susah dan tidak memungkinkan. Sehingga untuk penilaian aspek sikap dan perilaku sangat terbatas pada ruang laptop dan ruang *zoom* atau *google meet* dan *platform* LMS yang dikembangkan UMM melalui *Elmu.umm.ac.id*.

Evaluasi program menurut para ahli yaitu suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan (Arikunto & Jabar, 2004) dan (Arikunto, 2019). Dalam hal ini, evaluasi penanaman nilai-nilai Pancasila dalam Pembelajaran PPKn berbasis Polysynchronous yang dilakukan dalam kerangka dan wahana pelaksanaan pendidikan karakter di perguruan tinggi, dilakukan untuk memperoleh informasi secara objektif dengan membuat suatu instrumen yang telah disiapkan oleh Dosen, guna didapatkan hasil evaluasi yang akurat, berkelanjutan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang dicapai, sehingga nantinya digunakan sebagai dasar untuk menentukan tindakan selanjutnya. Evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter dilakukan untuk mengukur apakah Mahasiswa sudah memiliki satu atau sekelompok karakter yang ditetapkan oleh sekolah dalam kurun waktu tertentu (Wibowo & Purnama, 2013).

Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn sebagai wahana pendidikan karakter di perguruan tinggi dengan menggunakan platform Polysynchronous dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Ditinjau dari segi kebijakan pemerintah, kebijakan kampus, dana, Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana atau fasilitas yang ada di kampus seluruhnya mendukung kegiatan ini. (2) Bapak/ibu dosen telah melaksanakan kegiatan ini mendapatkan dukungan dari pihak prodi dan dekanat serta penjamin mutu internal. Kegiatan tersebut sudah dijadwalkan atau terprogram oleh pihak prodi, sesuai dengan arahan dekanat, dan prodi yang telah mendapatkan diklat pembelajaran Polysynchronous dari Satgas UMM. (3) Dukungan dari bapak/ibu dosen, atau yang lebih luas lagi, yaitu dari warga civitas akademika yang menjadikan kampus memiliki situasi yang kondusif, dimana tempat yang tersedia cukup layak untuk dilakukan proses penanaman nilai-nilai pancasila sebagai perwujudan pengembangan pendidikan karakter di perguruan tinggi. (4) Seluruh pihak ikut serta dalam pelaksanaan pendidikan karakter di perguruan tinggi, kegiatan ini dimulai dari bagian sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), kepemimpinan, dan keteladanan dari bapak/ibu dosen. (5) Dukungan dari seluruh civitas akademika dan kondisi lingkungan yang kondusif, menjadikan kegiatan implementasi penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai perwujudan pendidikan karakter di perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi membutuhkan dukungan dari pemerintah, warga kampus, sarana dan prasarana yang memadai, kegiatan-kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler yang terprogram dan rutin dilakukan, serta lingkungan yang kondusif merupakan faktor-faktor yang mendukung dalam pembentukan pendidikan karakter di perguruan tinggi. Karakter manusia Pancasila merupakan sekumpulan sifat-sifat yang menyeluruh dari sebuah kepribadian yang utuh. Sifat-sifat yang menyeluruh dari sebuah kepribadian akan mewarnai perilaku seseorang. Apabila seseorang berperilaku baik di kampus, di rumah atau di tengah masyarakat, maka kelak perilaku baik tersebut akan terbawa sampai mahasiswa dapat bekerja secara mandiri dan dewasa.

Ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak kampus terutama dosen dalam melaksanakan penanaman nilai-nilai Pancasila pada pembelajaran PPKn sebagai implementasi pendidikan karakter di perguruan tinggi, dengan menggunakan platform Polysynchronous. Aspek lingkungan teman sebaya mahasiswa yang beragam dan kurang kondusif, kadang menghambat dalam mengontrol perilaku mahasiswa di luar lingkungan kampus. Hambatan yang sering dialami dosen dalam pencapaian pendidikan karakter adalah pengaruh media massa dan kondisi lingkungan tempat tinggal peserta didik/mahasiswa.

Upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai nilai utama pendidikan karakter pada mahasiswa terutama dalam rangka pembentukan profil pelajar Pancasila pada mahasiswa, hal ini dilakukan agar Mahasiswa selalu konsisten dalam membenahi perilakunya ke arah yang lebih baik, pendidikan karakter adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran dan jasmani anak agar selaras dengan alam dan masyarakatnya (Hamid, Sudira, & Sukolilo, 2013). Cara yang dilakukan pihak kampus guna mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pendidikan karakter, diantaranya: pertama, pihak kampus saling berkoordinasi, musyawarah, dan mengingatkan apabila ada hambatan dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Tentunya dengan upaya saling kerjasama dan menyamakan persepsi warga kampus agar pelaksanaan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai esensi pendidikan karakter sesuai dengan yang diharapkan.

Kedua, pihak kampus berusaha untuk menjalin komunikasi dua arah dengan orang tua/wali murid mengenai perilaku peserta didik (Koesoema, 2007). Perilaku dan sikap dari Mahasiswa pada saat di rumah sebaiknya selalu dalam pengamatan orang tua/wali. Ketiga, diharapkan adanya dukungan, perhatian, dan pengawasan dari orang tua dalam pembentukan karakter mahasiswa. Karena pendidikan karakter bukan hanya tanggung jawab dosen semata, melainkan tanggung jawab bersama agar apa yang di terapkan dikampus bisa sejalan dengan lingkungan tempat tinggal mahasiswa. Keempat, mahasiswa perlu diberikan nasehat yang membangun, agar mahasiswa memahami betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter pada kehidupan mereka selanjutnya. Memang tidak mudah dalam membentuk karakter Mahasiswa yang berkualitas, semuanya dibutuhkan kesabaran, kerja keras dan pembiasaan yang berlangsung secara terus menerus, karena watak dan warna yang beragam dari para mahasiswanya.

Pihak kampus meskipun mengalami berbagai hambatan dalam pembinaan/pelaksanaan pendidikan karakter ini, namun pihak kampus berusaha untuk dapat menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut dengan cara yang bijak. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai cara yang ditempuh oleh pihak kampus agar pembinaan/pelaksanaan pendidikan karakter bisa berjalan dengan baik. Kesimpulannya, penanaman atau internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari pembinaan/pelaksanaan pendidikan karakter di Perguruan Tinggi ini telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sehingga didapatkan hasil yang optimal.

Simpulan

Keberhasilan suatu program dalam pelaksanaan penanaman nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PPKn di Perguruan Tinggi yang menggunakan platform Polysynchronous memerlukan dukungan dari berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Proses penanaman nilai-nilai karakter Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis Polysynchronous di era New Normal dilakukan melalui beberapa strategi yaitu : (1) memetakan substansi nilai karakter yang dikembangkan dengan berbasis pada nilai RENAMAGI yang terinternalisasi dalam sila-sila Pancasila, (2) mengembangkan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif dan kontekstual; (3) mengembangkan sistem evaluasi yang baik dan sesuai dengan platform polysynchronous dan model *daring*. Upaya membangun karakter dan profil Pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir dari upaya pendidikan karakter di lingkungan perguruan tinggi mengalami beberapa hambatan dan problematika dalam pelaksanaannya. Apalagi dengan menggunakan platform polysynchronous sebagai bagian dari model pembelajaran *blended learning* di era new normal. Di samping itu juga ditemukan sejumlah faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di perguruan Tinggi akan memperkokoh

pendidikan karakter dan mendukung upaya pembentukan profil pelajar Pancasila di masa depan. Sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat menentukan untuk suksesnya misi besar tersebut.

Referensi

- Arikunto, S. (2019). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan* (edisi revisi).
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Farisi, M. I. (2011). *Kompetensi Guru dalam Mewujudkan Pendidikan Berkarakter dan berbasis Budaya*. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 11(1)(ISSN 0854-7149), 23-33. Retrieved from <http://jm.tp.ac.id/view/1331224689/mohammad-imam-farisi/kompetensi-guru-dalam-mewujudkan-pendidikan-berkarakter-dan-berbudaya>
- Hamid, edy Suandi; Khalil, M. (2020) *e-book Pembelajaran Daring PTMA dimasa Pandemi Covid-19*.
- Hamid, A., Sudira, P., & Sukolilo, D. S. (2013). *Penanaman Nilai-Nilai Karakter Siswa SMK Salafiyah Program Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah*. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 2(3), 1-15.
- Koesoema, D. (2007). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo, 212-221.
- Kokotiasa, W., & Budiyo, B. (2013). *Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Mencari Model Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(1), 66-82.
- Maftuh, B. (2008). *Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. *Jurnal Educationist*, 2(2), 134-144.
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Analisi Data Qualitative: An Expanded Sourcebook*.
- Munawar-Rachman, O. B. (2020). *Pancasila dan Kerukunan Lintas Agama*. Rachman, Budhy Munawar, 2020. *Pancasila Dan Kerukunan Lintas Agama Di Indonesia. Salindia Dalam Webinar SIGMA Pancasila, Hotel Horison, Serang Banten, 11-12 September 2020*.
- Pembinaan, B., Pancasila, I., & Indonesia, R. (n.d.). Oleh Antonius Benny Susetyo Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP.
- Pendidikan, K., Kebudayaan, D. A. N., Indonesia, R., Penelitian, B., Pengembangan, D. A. N., Perbukuan, D. A. N., ... Perbukuan, D. A. N. (2020). *Profil Pelajar Pancasila* 31.
- Rusdiana, A., Sulhan, M., Arifin, I. Z., & Kamaludin, U. A. (2020). *Penerapan model POE2WE berbasis blended learning google classroom pada pembelajaran masa WFH pandemic Covid-19*.
- Saputro, R. D. (2018). *Peran Guru PPKn Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Disiplin Melalui Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di SMP 1 Pancasila Wonogiri*. In *Prosiding Seminar Nasional PPKn 2018" Seminar Nasional Penguatan Nilai-Nilai Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Persekolahan dan Kemasyarakatan" Laboratorium PPKn FKIP UNS*.
- Sari, A. R. (2013). *Strategi Blended Learning Untuk Peningkatan Kemandirian Belajar Dan Kemampuan Critical Thinking Mahasiswa Di Era Digital*. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 11(2).
- Sari, M. (2016). *Blended Learning, Model Pembelajaran Abad Ke-21 Di Perguruan Tinggi*. Ta'dib, 17(2), 126-136.
- Sujana, A., & Rachmatin, D. (2019). *Literasi digital abad 21 bagi mahasiswa PGSD: apa, mengapa, dan bagaimana*. In *Current Research in Education: Conference Series Journal* (Vol. 1, No. 1, p. 003).
- Susilawati, E. (2017). *Pengembangan Model Pembelajaran Blended Learning Pada Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan*. *Edutech*, 16(3), 288-304.
- Wiratomo, G. H., Wahono, M., & Kristiono, N. (2017). *Model Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Oleh Guru PPKn Jenjang SMP di Kota Semarang*. *Integralistik*, 28(2), 119-130.

- Wibowo, A., & Purnama, S. (2013). *Pendidikan Karakter Di Perguruan Tinggi: Membangun Karakter Ideal Mahasiswa Di Perguruan Tinggi*. Pustaka Pelajar.
- Wijaya, E. Y., Sudjimat, D. A., Nyoto, A., & Malang, U. N. (2016). *Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Global*. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika (Vol. 1, pp. 263–278).
- Zuriyah, Nurul. (2020) *Best Practices Polysynchronous Blended Learning Elmu Platform Pembelajaran Daring di Era New Normal* Jurnal Civic Hukum, (Volume 7, Nomor 1, Mei 2021, hal 62-74).